

AKAR TRADISI POLITIK SUFI ULAMA KALIMANTAN BARAT ABAD KE-19 DAN 20

By DIDIK M NUR HARIS

AKAR TRADISI POLITIK SUFI ULAMA KALIMANTAN BARAT ABAD KE-19 DAN 20

Didik M Nur Haris

Rahimin Affandi Abdul Rahim

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

email: didiknurharis@gmail.com,

faqir_ila_rabbih@um.edu.my

Diterima: 26 Januari 2016. Disetujui: 01 April 2017

Dipublikasikan: Mei 2017

Abstract

Politics and Sufism, Two things that would never meet, There is a subjective view that the decline of Islam is due to the Sufis distancing themselves from the social and political activity. Historical facts prove that the Sufis who come to the archipelago have taught the real Islam and comprehensive in both the social, economic and political fields. This review will present historical evidence of the Sufi political tradition in the Indonesian archipelago and West Kalimantan in particular through the study of the third most popular ulamas of West Kalimantan in the 19th and 20th centuries namely Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879), Muhammad Basuni bin Muhammad `Imran (1885-1953) dan Guru Haji Isma`il Mundu (1870 – 1957).

Keywords: *Politik, Ulama Sufi, Kalimantan Barat*

A. Pendahuluan

Terdapat satu pandangan di kalangan tarekat dan tasawuf bahwa sufi sejati adalah mereka yang anti dan menjauhkan diri (*uzlah*) dari semua aktifitas sosial dan politik. Dalam

pandangan mereka, konsep *zuhd* berarti kehidupan yang lebih berorientasi kepada urusan akhirat dibanding masalah dunia dengan menjauhkan diri dari masyarakat (*kehalwah* dan *uzlah*), dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹ Sebagian sarjana barat juga menyematkan sufi yang sebenarnya adalah mereka yang anti terhadap dunia dan fokus kepada keakhiratan.²

Pemikiran ini telah berdampak kepada pemahaman banyak kalangan muslim modernis, yang menganggap kesufian sebagai salah satu penyebab utama kemunduran dunia Islam. Mereka menuduh kesufian sebagai sumber *bid'ah*, *tabayul* dan *keburafat*. Secara sosial, kesufian telah dipersalahkan karena menarik masyarakat muslim ke arah “kepasifan” dan penarikan diri (*uzlah*) dari permasalahan duniawi. Ia dianggap menggalakkan sikap pelarian diri (*escapism*) dari kemunduran sosio-ekonomi-politik kaum muslimin. Akibatnya, masyarakat muslim tidak mampu bersaing dengan dunia Barat yang terus maju.³

Realitas ini memang tidak dapat dipisahkan dari program-program kaum orientalis barat⁴ seperti Thomas Stamford Raffles (1781-1826), William Marsden dan Cristiaan

¹Martin Van Bruinessen, “*Tarekat Dan Politik: Amalan Untuk Dunia Atau Akberat?*,” *Majalah Pesantren*, Vol. IX No. 1, 1992), 6-7.

²John Bousfield, “Islamic Philosophy in South-East Asia”, dalam *Islam in South-East Asia*, ed. M.B. Hooker (Leiden: British Institute in South East Asia, 1983), 105-117. Athur John Arberry. *The Doctrine of the Sufis*. England: Cambridge University Press, 1966), 9. Syed Naguib al-Attas. *Some Aspects of Sufism; As understood and practiced among the Malays*. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963), h. 1.

³Shukri Ahmad, Ismail Yusoff & Hamzah, *Pendekatan Dakwah Ulama Sufi Nusantara Abad ke-17M dan 18M: Suatu Analisis Perbandingan dengan Pendekatan Dakwah Ulama Malaysia Abad ke-21*. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara. IV, 25-26 November 2011, h. 428.

⁴Segolongan sarjana-sarjana Barat yang mendalami bahasa-bahasa dunia timur dan kesusasteraannya, dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia timur, sejarahnya, adat istiadat dan ilmu-ilmunya. A. Hanafi, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits)* (Jakarta: Pustaka al Husna, 1981), h. 9.

Snouck Horgonje (1857-1936),⁵ mereka memalsukan, memutarbalikan ajaran-ajaran Islam, dan menyebarkan ilmu dan pemikiran yang subyektif tentang Islam seperti konsep *zuhd*, *kebahwab* dan *uzlah*, *sufi* dan *tasawuf* dan lain-lain.

Kajian ini akan membuktikan kesalahan tuduhan pemikiran diatas, dengan memaparkan berbagai bentuk peranan politik ketiga ulama sufi yang populer di Kalimantan Barat pada abad ke-19 dan 20 yaitu Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 M), Muhammad Basuni bin Muhammad 'Imran (1885-1953 M) dan Guru Haji Isma'il Mundu (1870 – 1957 M), bagaimana mereka mampu merumuskan hubungan yang harmoni antara Islam dan kekuasaan, agama dan negara, duniawi dan ukhrawi dalam sebuah tatanan konsep yang aplikatif.

B. Pembahasan

1. Dotrin Politik Pada Masa Nabi

Doktrin politik dalam Islam sesungguhnya merupakan konsep yang telah ada semenjak lahirnya Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W., dimana keberadaan Rasulullah SAW disamping sebagai muballigh (penyampai wahyu), pemberi peringatan dan kabar gembira, beliau juga seorang Pemimpin dalam sebuah komunitas masyarakat, panglima dalam medan pertempuran dan juga Hakim dan referensi dalam segala permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh umat, dimana semua aktifitas ini pada hakekatnya merupakan aktifitas politik dalam konteks kekinian. Rasulullah S.A.W. telah mengenalkan, mengajak dan menyeru kepada sebuah nilai, pemikiran dan prinsip-prinsip hidup yang baru yang bertentangan secara total dengan konsep, pemikiran dan keyakinan masyarakat Arab saat itu, aktifitas ini adalah aktifitas politik yang kita kenal di masa kini. Beliau telah meminta perlindungan kepada pemimpin-

⁵Harian Surat Kabar Republika, *Islamia : Tokoh-tokoh Orientalis di Indonesia*. Kamis, 13 Agustus 2009.

pemimpin Thaif yaitu tiga bersaudara yang bernama: Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaib mereka adalah putra-putra dari Amr bin Umair bin Auf dari Bani Tsaqif. Beliau meminta suaka politik kepada Raja Najasyi dari Habsyah, aktifitas ini pada hakekatnya juga aktifitas politik yang kita kenal hari ini. Beliau mengambil janji setia kaum Anshar untuk membela hingga titik darah yang terakhir dalam peristiwa " *Bai'atul Aqabah Kedua*", aktifitas ini pada hakekatnya merupakan aktifitas politik. Beliau berhijrah mencari bumi subur untuk menyemaikan nilai-nilai Islam, membina umat dan komunitas masyarakat baru, mempersaudarakan diantara elemen masyarakat hingga beliau mengirim pasukan perang, melakukan perdamaian dalam peristiwa " Perjanjian Hudaibiyah", membangun basis-basis ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan, semua aktifitas-aktifitas ini hakekatnya aktifitas politik yang kita kenali di era moden.⁶

2. Dotrin Politik Para Ulama Sunni

Perkembangan doktrin politik Islam sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian politik Islam yang dikembangkan oleh para pemikir klasik seperti Imam al-Mawardi (975-1058 M) dalam karyanya *Nasibat al-Muluk* dan *al-Abkam al-Sultaniyyah*, al-Ghazali (1058-1111 M) dalam karyanya *al-Tibr al-Masbuq fi Nasibat al-Muluk* dan Ibn Taimiyah (1263-1329 M) dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*.

Kajian-kajian mereka dalam bidang politik Islam (*siyasah syar'iyyah*) merupakan satu bagian yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa, "*Imamah (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) untuk melindungi*

⁶Shafiyurrahman al-Mubarafuri, *al-Rabiq al-Makhtum* (Mesir: Dar al-Wafa, 1430 H/ 2009 M), h. 167-180.

agama dan mengatur kehidupan dunia (*al-imamah mawdu'ab li khiblafat al-nubuwwah fihirasat al-din wa siyasat aldunya*).⁷

al-Ghazali mengatakan : “kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara, adalah berdasarkan kewajiban agama (*Shari'*), bukan rasio. Kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar. Agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi.”⁸

Menurut Ibn Taimiyah, “kesejahteraan manusia tidak dapat tercapai kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut”.⁹

Ketiga ulama klasik sunni telah merumuskan hubungan yang integral antara agama dan negara, meskipun mereka berbeda pendapat dalam landasan yang mendasari hukum pengelolaan negara dalam konteks syari'ah Islam. al-Mawardi berpendapat bahwa kewajiban menegakkan negara merupakan fardu kifayah yang dibina diatas dasar ijma' ulama. Pandangannya ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rashidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Dalam kaidah usul fiqh juga menyatakan bahwa “*malayatimmu al-wajib illabibi fabuwa wajib*” (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib hukumnya), artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib.¹⁰

⁷Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 5.

⁸Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasibat al-Muluk*, terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Mizan, 1994), h. 136.

⁹Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabat al-Riyad al-Hadithah, t.tp.), h. 23.

¹⁰Abu al-Hasan al-Mawardi, *Op. Cit.*

Sejalan dengan pendapat al-Mawardi, imam al-Ghazali memandang bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara adalah berdasarkan kewajiban agama (Syar'i), bukan logika. Menurutnya Agamadan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari rahim seorangibu. Keduanya saling melengkapi.¹¹

Berbeda dengan kedua ulama sunni sebelumnya, Imam Ibnu Taimiyah melihat bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat tercapai kecuali hanya dalam satu tatanan sosial dimana setiap orang saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu diperlukan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah pembinaan institusi negara bukanlah atas dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Meski ia mengakui bahwa kesejahteraan umat Islam tidak mungkin dapat tercipta baik di dunia maupun di akhirat kecuali melalui institusi negara.¹²

3. Tradisi Politik Sufi di Nusantara

Tradisi politik sufi ini juga tampak dengan jelas dari semenjak proses Islamisasi di kawasan Nusantara yang dibawa oleh para ulama tasawuf,¹³ tidaklah berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa Islamisasi kawasan Nusantara merupakan sebuah gejala dan fenomena politik. Konversi raja-raja Melayu di Nusantara ke dalam agama Islam merupakan kekuatan politik yang berperan sangat signifikan dalam pengislaman masyarakat kerajaan Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, setelah Islam mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar muslim dalam penyebaran Islam digantikan dan diambil alih oleh ulama. Mereka bertindak

¹¹Al-Ghazali, *Op. Cit.*

¹²Ibn Taimiyah, *Op. Cit.*

¹³Syed Naguib al-Attas, *Some Aspects of Sufism: As Understood and Practised Among the Malays*, (Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd. 1963), h. 24-26. Alwi Shihab, *Islam Sufistik, Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2001).

sebagai guru dan penasihat raja atau sultan, para ulama dan pendakwah yang datang semenjak awal di kawasan nusantara, sebagaimana yang pernah dirumuskan oleh ulama-ulama Sunni klasik. Tradisi politik ini semakin menguat sejalan dengan kuatnya pengaruh ulama di kerajaan-kerajaan Nusantara.¹⁴

Nuruddin al-Raniri (w. 1068 H/1658 M) misalnya, ia merupakan penasihat Sultan (*Sbaykb al-Islam*). daripada Sultan Iskandar Tsani di Aceh (1636-1642 M), bahkan pada masa pemerintahan pengganti Iskandar Tsani, Sultanah Safiatuddin Taj al-Alam (1642-1675 M), posisi al-Raniry sangat kuat tidak hanya dalam bidang agama, namun juga dalam masalah-masalah politik, ekonomi dan lainnya.¹⁵ *Raja Ali Haji* (1808 - 1973 M) telah dilantik menjadi penasihat agama kerajaan pada tahun 1845, semassa Raja Ali bin Raja Jafar diangkat menjadi Yang dipertuan Muda. Pada tahun 1858, ketika Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah Mursyid wafat, maka Raja Ali Haji diberi amanat untuk mengambil alih segala urusan hukum.¹⁶

Tradisi pengkaryaan dalam bidang politik juga telah ada pada awal-awal Islam di nusantara, seperti Bukhari al-Jawhari menulis *Taj al-Salatin* (1603), al-Raniri (1658) dengan karyanya *Bustan al-Salatin*, Raja Ali Haji (1873) *Thamarat al-Muhimmah Diyafah li al-Umara' wa al-Kubara' li Abl al-Mahkamah* (Buah-buahan yang dicita-cita hal keadaan jadi jamuan bagi raja-raja dan bagi orang-orang besar yang mempunyai pekerjaan di dalam tempat berhukum) yang Ia telah siap ditulis pada 1275/1857 namun terbit pertama kali di Lingga pada tahun 1304/ 1886.¹⁷

¹⁴Muhammad Iqbal, *Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia pada masa kerajaan Islam di Nusantara*. ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011, 61.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Khalif Muammar A. Harris, "Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad Ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji," (*Sari - International Journal Of The Malay World And Civilisation*. 29 (1) (2011), h. 82-83.

¹⁷Khalif Muammar A. Harris, *Op.Cit*, 81.

4. Tradisi Politik Sufi di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat telah dikenali sejak dahulu sebagai kawasan pusat penyebaran dakwah Islam. Di kawasan ini terdapat 21 kesultanan Islam yang masih dapat diketemukan bukti-bukti arkeologinya sehingga kini.¹⁸ Kepesatan penyebaran Islam di kawasan ini, tidak dapat dipisahkan dari adanya jaringan ulama-ulama Nusantara dan ulama-ulama Mekah yang telah terjalin mesra sejak abad ke-17 berawal dari Nur al-Din al-Raniri (w.1666) , Abd Rauf al-Singkili (1620-1695) dan Yusuf al-Maqassari (1626-1699). Seterusnya di susul oleh Muhammad Nafis al-Banjari (L.1735), Dawud al-Fatani (1718-1847) dan lainnya telah membawa dampak hebat terjadinya proses pembaruan di kawasan ini.¹⁹

¹⁸Diantara kesultanan-kesultanan Islam yang pernah berdiri adalah (1).Istana Matan di Kota Ketapang abad ke-16, (2).Istana Sukadana di Kabupaten Ketapang abad ke-16, (3).Istana Simpang (Melano) di Kabupaten Ketapang abad ke-16, (4).Istana Kendawangan di Ketapang abad ke-16, (5).Istana Kubu di Kabupaten Kubu Raya abad ke-19, (6).Istana Amantu Billah di Mempawah abad ke-18, (7).Istana Al Watiq Billah di Sambas abad ke-17,¹⁸ (8).Istana Kadriah di Kota Pontianak abad ke-16, (9).Istana Landak di Ngabang sejak tahun 1472 M, (10).Istana Tayan di Kabupaten Sanggau abad ke-19, (11).Istana Kuta di Kabupaten Sanggau abad ke-19, (12).Istana Beringin di Kabupaten Sanggau abad ke-19, (13).Istana Sekadau di Kabupaten Sekadau abad ke-19, (14).Istana Sintang di Kota Sintang abad ke-18, (15) Istana Nanga Silat di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (16).Istana Semitau di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (17).Istana Jongkong di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (18).Istana Selimbau di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (19).Istana Nanga Suhaid di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (20).Istana Nanga Bunut di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19, (21).Istana Piasak di Kabupaten Kapuas Hulu abad ke-19. Tim Peneliti Universitas Tanjung Pura (UNTAN), h. Pontianak: *Istana di Kalimantan Barat*, (Untan, 2000), h. 2. Pabali Musa, "*Latar Belakang Sosial Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas*", (Disertasi pasca sarjana, UIN, Jakarta, 2008), h. 19.

¹⁹Menurut Azra, ulama al-Raniri dan al-Singkili abad ke-17 dan Muhammad Arsyad al-Banjari dan Dawud al-Fathani abad ke-18, sangat membantu perkembangan keilmuan Islam di Nusantara dengan karya-karyanya yang beredar luas di Nusantara. diantaranya al-Shirat al-Mustaqim karya al-Raniri, Mir'ah al-Thullab fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Shar'iyah li al-Malik al-Wahhab, Kitab al-Faraidl karya Abd al-Ra'uf al-Singkili, Sabil al-Muduhtadin karya Muhammad Arsyad al-Banjari. Hidayat al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin dan Siyar al-Salikin ila 'Ihadat Rabb al-'Alamin karya Abd al-Samad al-

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat ulama-ulama yang menjadi rujukan tidak saja ulama-ulama Nusantara namun juga ulama-ulama dunia Islam pada umumnya. Diantaranya adalah Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 M), Muhammad Basuni bin Muhammad 'Imran (1885-1953 M) dan Guru Haji Isma'il Mundu (1870 – 1957 M).

5. Akar Politik Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 M)

Ahmad Khatib al-Sambasi adalah diantara ulama yang memiliki pengaruh cukup hebat dalam menyebarkan ajaran tarekat bahkan telah berhasil memadukan antara tarekat Qadiriyyah dan tarekat Naqshabandiyah sehingga lebih dikenali dengan Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah (TQN).²⁰ Ide cemerlang dan usaha penyatuan Tarekat Qadiriyyah dan Tarekat Naqshabandiyah sesungguhnya merupakan langkah politik besar untuk merancang, mengurus, mengendalikan, dan menjaga kemaslahatan serta menjauhkan keburukan, ini merupakan hakekat inti dan tujuan utama aktifitas politik dalam syariah Islam (*siyasah syar'iyah*), sebagaimana yang dikemukakan Ibn 'Aqil yang menyatakan *Siyāsah syar'iyah* ialah : “*Suatu tindakan oleh pemimpin yang boleh menyelamatkan orang ramai dan menghindarkan mereka dari kehancuran, walaupun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh*

Falimbani, Sabil al-Muhtadin karya Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari, Bughyah al-Tullab al-Murid Ma'rifat al-Ahkam bi al-Sawab, Furu' al-Masail wa Usul al-Masail, Jami' al-Fawa'id, Hidayat al-Mut'allim wa 'Umdat al-Mu'allim, Muniyyat al-Musalli, Nahj al-Raghibin fi sabil al-Muttaqin, Ghayat al-Taqrīb dan Idlah al-bab li Murid al-Nikah bi al-Shawab karya Dawud bin Abdullah bin Idris al-Fatani. rujukan-rujukan utama karya-karya ulama-ulama timur Tengah seperti Syarh Minhaj al-Thullab karya Syams al-Din al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya al-Nawawi, tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Ibn Hajar al-Haithami, Mughni al-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini. Lihat dalam Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, c. 2, (Bandung: penerbit Mizan, 1995), h. 225-340.

²⁰Syed Naquib al-Attas menyebut Ahmad Khatib Sambas sebagai Shaikh dari kedua tarekat tersebut. Syed Naquib al Attas, *Op. Cit.*, 33.

Rasulullah s.a.w. atau pun tidak ada wahyu berkenaan perkaratersebut".²¹ Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian sarjana mengemukakan bahwa formulasi dan penyatuan ajaran tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah lebih merupakan pertimbangan yang lebih bersifat politik iaitu *pertama*, dengan penyatuan ini diharapkan akan mengembalikan semangat awal berdirinya tarekat itu sendiri iaitu sebagai suatu gerakan sosial yang dinamis untuk melawan keadaan lingkungan yang tidak ideal, *kedua*, jika penyatuan ini terhasil, maka dapatlah dipastikan bahwa seluruh dunia Islam ketikaitu bersatu dalam satu kepemimpinan.²² Apa yang dilakukan oleh Ahmad Khatib dalam langkah penyatuan ini juga tidak dipisahkan dari realitas geo-sosial politik yang sedang berkembang saat itu, *realitas pertama*, kondisi sosial politik ummat Islam yang menghadapi gelombang tantangan yang besar baik dari eksternal maupun internal, tantangan eksternal paling besarmuncul dari kolonialisme penjajahan yang menguasai di hampir seluruh dunia Islam termasuk di kawasan Nusantara, tidak hanya tantangan yang bersifat politik dan kekuasaan, namun di dalamnyaterkandung tantangan misi kristenisasi dan program sekularisasi²³, dengan menjadikan Islam dalam sebuah rumusan yang sempit, *pertama*, Islam hanya terbatas dalam bidang agama murni (ibadah), *kedua*, di bidang sosial kemasyarakatan pemerintah kolonial memanfaatkan hukum adat sebagai sebuah aturan dalam perundangan, *ketiga*, di bidang politik pemerintah kolonial harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.²⁴

²¹Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, 11.

²²Pabali Musa, *Op. Cit*, 179.

²³Sekularisme merupakan paham yang memisahkan peran antara agama dan negara; sakral dan profan; duniawi dan ukhrawi. Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), h. 197-199

²⁴Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 12.

Secara internal, Ahmad Khatib melihat secara langsung sepanjang hayatnya di Mekah kondisi yang sangat memprihatinkan, khususnya perebutan kekuasaan antara kesultanan Turki Uthmani, Dinasti Saudi dan penguasa Mesir Muhammad Ali Pasa selama kurun 1804-1849,²⁵ sedangkan dalam gerakan keagamaan seperti tarekat, munculnya hubungan yang tidak harmoni akibat perebutan pengaruh yang berdampak kepada timbulnya perselisihan yang hebat. Martin Bruinessen menuliskan bahwa perselisihan dan persaingan tidak sehat ini, tidak saja terjadi di Mekah dan Madinah, namun juga terjadi antar murid-murid mereka di Indonesia dengan melemparkan tuduhan bahwa pihak lawannya telah menyimpang dari ajaran tarekat naqshabandiyah yang sebenarnya, persaingan ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh motif keuntungan secara ekonomi. Beberapa surat mereka disita oleh pemerintah Belanda seperti dalam MGS 23-5-1886, No 91 c (Arsip Nasional) yang ditandatangani oleh Muhammad Sa'id Gusti Banjar (semasa itu adalah Kalimantan Tenggara) dan Abd Rahman, Muhammad Yunus bin Abd Rahman dan Zain al-Din Rawa (Sumatera tengah) telah merekam beberapa bukti fenomena ini.²⁶

Di sisi lain, doktrin-doktrin tasawuf tentang *Khalifat Allah fi al-Ard* serta konsep *bai'at* dalam membina ikatan antara guru atau mursyid dengan murid-muridnya, yang sesungguhnya formulasi ajaran yang mengadopsi dari konsep politik dalam pemerintahan Islam melalui sistem Khilafah Islamiyah sangat berpengaruh terhadap implementasi ajaran-ajaran tasawuf dalam menghadapi realitas dan dinamika kehidupan.

Apa yang telah dilakukan oleh Ahmad Khatib telah memberikan warna baru dalam kajian tasawuf, sehingga

²⁵Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekkah dan Madinah) 1800-1925* (Ciputat: Logos, 1999), h. 131-134.

²⁶Martin Bruinessen, *Tarekat Naqsybandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), h. 68-69. Pabali, *Op. Cit.*, 172-173.

dalam perkembangannya, di setengah kedua abad ke-19, tarekat Ahmad Khatib Sambas tampil sebagai sarana dalam penyebaran Islam di seluruh Indonesia dan dunia Melayu,²⁷ tarekat Ahmad Khatib juga menjadi faktor pembangkit lahirnya semangat aktifisme dan heroik yang tinggi. Murid-murid dari Ahmad Khatib Sambas lahir berperan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek pendidikan dengan lahirnya institusi pesantren yang tersebar di hampir keseluruhan pulau Jawa, pada aspek sosial, tarekat Ahmad Khatib telah menginspirasi pembinaan banyak organisasi sosial masyarakat seperti *Nabdhlah al-Ulama* (NU) yang didirikan oleh salah satu cucu murid Syekh Ahmad Khatib yaitu Syekh Hasyim 'Ash'ari. Bahkan dari salah satu murid kesayangannya yang dilantik sebagai wakil Khalifahannya di Nusantara yaitu Syekh 'Abdul Karim al-Bantani telah memimpin satu perjuangan melawan kolonial Belanda di penghujung abad ke-19.²⁸

Realitas ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh geneologi keilmuan dan intelektual yang diterima oleh Ahmad Khatib al-Sambasi, terutama Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani (1720-1843) yang banyak memberikan pengaruh kepada kepribadian Ahmad Khatib, Syekh Daud al-Fathani merupakan ulama Nusantara yang populer pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19, beliau lahir di Kerisik di lingkungan Istana Sultan Patani pada tahun 1131 H/1720 M, Ia sangat produktif dalam penulisan dan pengkajian, Wan Mohd Shaghir telah mencoba mengumpulkan hasil-hasil karyanya tidak kurang daripada 66 judul buku, bahkan menurut beliau Daud al-Fatani telah menulis 99 kitab atau menurut pendapat lain

²⁷Srimulyati, *Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 179.

²⁸Yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Lihat dalam Sartono Kartodirdjo, "The Peasants' Revolt of Banten in 1888: The Religious Revival," dalam *Reading on Islam in Southeast Asia*, Ahmad Ibrahim et al., (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1985), h. 106. *Pemberontakan Petani Banten 1988, Kondisi, Jalan peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, ed. Hasan Basari, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), h. 20.

hingga 101 kitab, selebihnya belum diketahui judulnya, tidak saja aktif dalam penulisan, Syeikh Daud juga terlibat dalam peperangan jihad *fi sabilillah*.²⁹

Di sisi lain, ciri khas teknik berzikir tarekat Qadiriyyah yang diucapkan dengan suara keras serta diiringi gerak yang bersemangat baik berdiri maupun duduk, sudah tentu akan dapat membangkitkan semangat heroik dan sangat cocok bagi para pejuang.³⁰

6. Akar Politik Muhammad Basuni Imran (1885-1953 M)

Syeikh Muhammad Basuni Imran merupakan tokoh pembaharu abad ke-20 di kawasan Kalimantan Barat, ia hidup sezaman bahkan seguru dengan beberapa tokoh pembaruan Indonesia lainnya seperti K.H. Ahmad Dahlan (lahir 1869) pendiri *Muhammadiyah*, K.H. Hasyim Asy'ary (lahir 1887) pendiri *Nahdhatul-Ulama* (NU), G.F. Pijper mengatakan: "*Pandangan H. Muhammad Basuni Imran telah mewakili reformasi Mesir dengan sebenar di Indonesia*".³¹ Syeikh Muhammad Basuni Imran hampir di sebagian besar masa hidupnya berhubungan dengan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kesultanan Sambas, diantaranya *pertama*, Maharaja Imam di kesultanan Sambas (1913-1946 M), adalah Jabatan yang paling masyhur, *Kedua*, Kepala *Madrasah al-Sultaniyah* (1919-1935 M), pada masa Sultan Muhammad Shafiyuddin II, yaitu lembaga pendidikan di lingkungan istana yang memberikan pendidikan dasar agama dan ilmu-ilmu umum bagi kerabat sultan, anak-anak pejabat kesultanan dan masyarakat di kawasan istana, *ketiga*, *Adviseur Commissie voor ZelfBestuur* (1946-1950 M) yaitu jabatan resmi penasihat pemerintahan otonomi di Sambas

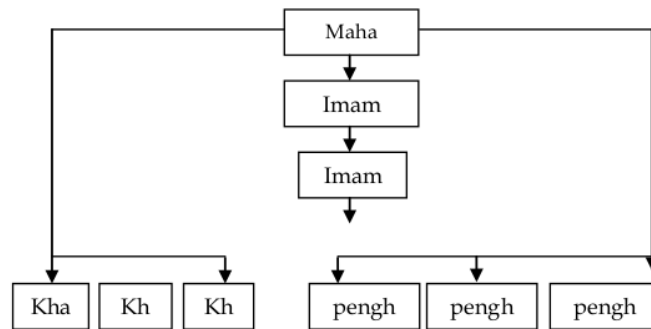
²⁹Wan Mohd Shaghir Abdullah, *Penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu*, Seri 11 (Kuala Lumpur: Persatuan Pegkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah, 2000), h. 7-12.

³⁰Pabali Musa, *Op. Cit*, 116.

³¹G.F.Pijper, *Studien Over de Geschiedenis Van De Islam In Indonesia 1900-1950*, (Netherlands: E.J. Brill Leiden, 1977), h. 134.

dari pemerintahan Belanda, *keempat*, Penata hukum tingkat I atau kepala pengadilan agama Mahkamah syariah Kalimantan Barat (1966-1975 M) dan *kelima*, anggota Konstituante Republik Indonesia wakil daripada partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Kalimantan Barat hasil dari pemilu I, tahun 1955.³²

Diantara terobosan yang cukup penting ketika menjabat sebagai Maharaja Imam mufti kerajaan Sambas adalah reformasi birokrasi lembaga keimaman, seperti yang tampak dalam skema gambar berikut:³³



Dari skema gambar di atas, tampak jelas bahwa mulai dari Maharaja Imam, Imam Maharaja dan Imam merupakan jabatan tertinggi yang berkedudukan di pusat kerajaan, sedangkan khatib dan penghulu berkedudukan di desa dan kampung bertanggung jawab langsung kepada Maharaja Imam. Imam Maharaja merupakan wakil dari Maharaja Imam, sedangkan Imam dan Khatib adalah petugas dalam pelaksanaan shalat jumat di masjid-masjid, adapun penghulu bertugas dalam hal pencatatan perkawinan.

³²Machrus Effendy, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Maha Raja Imam Sambas*, 29-30. Pabali, "Mubammad Basuni Inman (1883-1976), b. Rekonstruksi Pemikiran Maharaja Imam Sambas-Kesultanan Sambas Kalimantan Barat (Tesis Program Magsiter Pemikiran Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), h. 46.

³³*Ibid.*

Yang cukup menarik dari tradisi politik yang dimainkan oleh Muhammad Basuni Imran adalah sikap kooperatif dan jalur kerjasama dalam pengelolaan pemerintahan yang sejak tahun 1813 M telah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, kemudian sejak 1818 M di bawah kekuasaan penjajah Belanda dengan didirikannya kantor perwakilan Belanda di Sambas.³⁴

Kepiawaian Muhammad Basuni Imran dalam pengelolaan ketatanegaraan tidak lahir secara tiba-tiba, namun tumbuh dan berkembang dari sebuah tempaan lingkungan, kakek Muhammad Basuni Imran yaitu H. Muhammad Arif merupakan Maha raja Imam pertama di kesultanan Islam Sambas, sedangkan H. Muhammad Imran ayahanda Muhammad Basuni Imran merupakan Maha raja Imam kedua di kesultanan Islam Sambas, lingkungan ini sangat besar memberikan warna dan pengaruh dalam membentuk kepribadian dan pola fikir Muhammad Basuni Imran.³⁵ Pertemuannya dengan beberapa tokoh reformis dunia Islam seperti Sayid Muhammad Rasyid Rida, pemilik majalah "*al-Manar*", guru Muhammad Basuni Imran ketika di Mesir merupakan tokoh reformis yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afgani, juga turut andil dalam membentuk kecerdasan politik (*political intelligence*) Muhammad Basuni Imran. Komunikasi diantara kedua tokoh reformasi ini tetap terjalin sehingga ketika Muhammad Basuni Imran kembali dan pulang di tanah air, berbagai permasalahan umat Islam yang sedang mendera menjadi salah satu topic perhatian dan perbincangan yang serius, hal tampak dari salah satu surat Muhammad Basuni Imran yang dikirimkan kepada sang guru di majalah *al-Manar* tentang "*Limadba taakebar al-Muslimuna wa limadba taqaddama*

³⁴Irwin, *Borneo Abad Kesembilan Belas*. Terj. Mohd. Nor Ghani dan Noraini Ismail, c. 2, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 33-63.

³⁵G. F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjihmah & Yessy Augustin (Jakarta: UI Press, 1984), h. 142.

ghairuhum?” (Mengapa Ummat Islam mundur dan orang lain maju?), pertanyaan ini kemudian menjadi buku dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Amir Shakib Arselan (1869-1945), buku ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berjudul “*Our Decline and its Causes*” terbit di Lahore Pakistan tahun 1944,³⁶ dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan pada tahun 1970-an.

Atas berbagai jasa dan kerjasamanya dengan pemerintah Hindia Belanda, Syekh Muhammad Basiuni Imran mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah Belanda, seperti, *Plaatselijke* (Piagam Penghargaan, 1920), dan *Ridder in de Orde van Oranje-Nassau* dari Ratu Wilhelmina, 13 September 1946.³⁷

7. Akar politik Guru Haji Isma'il Mundu (1870 – 1957 M)

Guru Haji Isma'il Mundu merupakan ulama kharismatik yang cukup populer di Kalimantan Barat, ia sezaman dengan Muhammad Basuni Imran bahkan seperguruan, ia bertemu dalam silsilah geneologi keilmuan Muhammad Basuni Imran dan Syekh Umar daripada Sumbawa.³⁸ Ia dikenali sebagai ulama tasawuf melalui ajaran-ajaran tasawufnya yang terdapat dalam karyanya Kitab *Dzikir Taubidiyah*.³⁹

³⁶G. F. Pijper, *Op. Cit.*, 148-149.

³⁷A. Muis Ismail, *Mengenal Muhammad Baisuni Imran (Maharaja Raja Sambas)* (Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura, 1993), h. 19, Machrus Effendi, *Op. cit.*, 16. G. F. Pijper, *Op. Cit.*, 145.. Pabali, *Op. Cit.*, 7.

³⁸M. Riva'I Abbas et al., *Biografi Guru Haji Isma'il Mundu, Mufti Kerajaan Kubu. C. 2* (Pontianak: Kitara Creativision, 2008), h. 12

³⁹Kitab ini diselesaikan pada 1 Muharam 1349 H diterbitkan Matba'ah Sayyid Alaydrus Keramat 38, Jakarta. Kitab ini mengandung zikir-zikir yang diamalkan oleh Guru Haji Isma'il Mundu beserta murid-muridnya yang telah mendapat ijazah (pengiktirafan untuk mengamalkannya). Kitab ini pada mulanya merupakan tulisan tangan dari Guru Haji Isma'il Mundu, namun pada akhirnya ianya dicetak kembali oleh Muhammad bin Yahya Alawy. Didik M Nur Haris, “*Kitab Jadwal Nikah karya Guru Haji Isma'il Mundu; Teks dan Analisis*” (Tesis Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya Malaysia, 2011), h. 42-43.

Kemasyhurannya semakin hebat ketika Guru Haji Ismail Mundu terlibat dalam jabatan mufti pemerintahan kerajaan Islam Kubu semenjak pemerintahan Raja Syarif Abbas, yaitu raja yang keenam (1900-1911), jabatannya ia duduki sehingga kali yang ketiga. Selain dari itu, berdasarkan surat tertanggal Pontianak, hari Kamis, 13 Februari 1936 H bertepatan 20 Zulhijjah 1354 M, Syaikh Guru Haji Ismail Mundu dilantik sebagai tokoh tertinggi yang menangani urusan Islam di kerajaan Pontianak dan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaannya.⁴⁰ Sejalan dengan tradisi politik yang diambil oleh Muhammad Basuni Imran, Guru Haji Isma'il juga memilih bekerjasama dalam pengelolaan pemerintahan yang tidak lagi secara penuh dalam kekuasaan kesultanan Kubu, namun telah jatuh dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda sejak 27 Agustus 1849.⁴¹ Ia bahkan menerima bintang jasa dan honorarium pemerintah Belanda daripada Ratu Wilhelmina sebagai sebuah tanda terimakasih dan penghargaan yang tinggi pada tahun 1930.⁴²

Keterlibatannya dalam kancah politik praktis tidak terpisah dari darah kebangsawanan yang mengalir dalam dirinya, Guru Haji Isma'il Mundu merupakan keturunan dari Raja Sarwito yang merupakan keturunan raja-raja Gowa Sulawesi Selatan.⁴³ Darah kebangsawanan ini semakin terasah ketika ia berguru kepada Syaikh Ahmad al-Zawawi, mufti mazhab *Shafi'i* di Mekah, pada masa pemerintahan Sharif Husein, beliau pernah menduduki jabatan ketua *majelis Shura*,

⁴⁰Wan Mohd Shaghir, *Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara*, j.6 (Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah 1425 H/2004 M), h. 73-74.

⁴¹Belanda, wester-afdeeling berdasarkan *Besluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8 dan No. 40

⁴²M. Riva'i Abbas et al., *Op. Cit*, 13

⁴³*Ibid.* h. 7.

ketua majelis *shuyukb* dan ketua *'ain Zubaidab*⁴⁴. Kedekatan keduanya sangat terlihat dari fakta sejarah adanya surat panggilan dari putra Sheikh Abdullah al-Zawawi yaitu Muhammad bin Abdullah al-Zawawi tertanggal 15 Safar 1340 H yang memohon kepada Guru Haji Isma'il Mundu untuk berziarah ke Makkah al-Mukarramah.⁴⁵ Persahabatannya dengan berbagai kalangan tokoh dan ulama Nusantara seperti Alawi bin Tahir bin Abdullah al-Haddad mufti kerajaan Johor dan Abbas bin Muhammad Taha pejabat Qadli Qudlat Singapura, dan juga Sayyid Hasan Jufri seorang mufti Hadramaut yang pernah berkunjung ke kesultanan Kubu, akan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam pemikiran dan kepribadiannya.⁴⁶ Ketokohnya dalam kancah politik semakin tampak jelas dari kunjungan resmi utusan presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno kepada Guru Haji Ismail Mundu untuk meminta pandangan dan solusi terhadap masalah-masalah bangsa.⁴⁷

8. Transformasi Politik Oposisi kepada Politik Koalisi

Terdapat fakta yang cukup menarik dalam tradisi politik ketiga ulama Kalimantan Barat abad ke-19 dan 20, dimana Ahmad Khatib al-Sambasi di abad ke-19 meskipun ia tidak terlibat dalam politik praktis, namun gerakan tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyahnya telah tampil sebagai sarana untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial seperti yang tampak dari salah satu murid yang dilantik sebagai wakil Khalifahannya di Nusantara yaitu Syeikh 'Abdul Karim al-Bantani yang telah memimpin satu perjuangan melawan kolonial Belanda di penghujung abad ke-19. Fakta ini sebagaimana dikemukakan oleh sebagian peneliti

⁴⁴Umar 'Abd Jabbar, *Kitab Siyar wa al-Tarajim ba'd ulamaina fi al-Qarn al-Rabi' al-'Asr min al-Hijrah*, c. 3. (Jedah: Tihamah al-Kitab al-Arabi al-Su'udi, 1403 H/1982 M), h. 140.

⁴⁵M. Riva'i Abbas et al., *Op. Cit*, 21

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷H. M. Riva'i H. Abbas et al, *Op. Cit*, 24.

tidak dapat dipisahkan dari geopolitik yang penuh pergolakan baik skala regional maupun internasional. Pada tingkat regional Inggris dan Belanda saling bertarung memperebutkan wilayah dagang di Nusantara yang berlangsung sejak abad-abad ke-17 dan puncaknya pada awal abad ke-19, sedangkan pada tingkat internasional pada abad ke-19 tantangan kolonialisme semakin meningkat di negara-negara Muslim, tahun 1770 Rusia telah mulai menguasai Turki, penguasaan ini telah menjadi babak baru penguasaan wilayah-wilayah Islam di Asia Tengah.⁴⁸ Tidak lama kemudian pada Juli tahun 1798 Napoleon Bonaparte menduduki Mesir, pola kepemimpinan Napoleon yang otoriter telah menjadi faktor yang membangkitkan perlawanan rakyat Mesir yang demikian hebat.⁴⁹ Konstelasi geopolitik yang memanas baik ditingkat regional maupun internasional ini yang menjadi pertimbangan utama jaringan tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah sebagai sarana gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

Tradisi politik ini mengalami transformasi yang sangat mendasar pada abad ke-20, dimana kedua ulama Kalimantan Barat yang populer pada abad ini yakni Muhammad Basuni Imran dan Guru Haji Isma'il Mundu lebih memilih sikap kooperatif dan bekerjasama dalam lingkungan pemerintahan yang berada dalam kekuasaan kolonial. Tradisi politik ini yang dikenali dalam kajian ilmu politik modern sebagai koalisi. Pilihan ini sangat mungkin dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, *pertama*, pertimbangan lapangan (*fiqh al-Waqi'*) dimana pada abad ini kekuasaan kolonial berada pada puncak kekuatannya, hal ini ditandai dengan penghapusan tiga kesultanan Islam yaitu Kesultanan Palembang (1820 M), Kesultanan Banjarmasin (1860 M), dan Kesultanan Aceh (1873 M), penghapusan ini yang melatarbelakangi beberapa

⁴⁸Hamka, *Sejarah Ummat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2005), h. 621.

⁴⁹Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 41-42.

Jihad di sebagian wilayah di Indonesia, yaitu jihad Cilegon (9-30 Juli 1888) dan Jihad Aceh (1873).⁵⁰ *Kedua*, pertimbangan kemaslahatan (*Fiqh al-Maslahah*), dimana sikap kooperatif dan bekerjasama lebih akan membawa dampak kemaslahatan yang lebih besar dibanding bahaya (*mudharat*) yang pasti ketika melakukan sebuah perlawanan, beberapa pertimbangan masalah itu diantaranya, *pertama*, membuka peluang untuk lebih merealisasikan lima dasar-dasar objektif syariah (*Maqasid al-sbari'ah*) yaitu: *Hifdhu al-Din* (Kewajiban menjaga agama), *Hifdhu al-'Aqli* (kewajiban menjaga akal), *Hifdhu al-Nafs* (Kewajiban menjaga jiwa), *Hifdhu al-'Irdi* (Kewajiban menjaga kehormatan) dan *Hifdhu al-Mal* (Menjaga Harta kekayaan). *kedua*, merealisasikan universalitas Islam melalui usaha perbaikan di bidang politik pemerintahan, *ketiga*, mengenal program dan strategi kolonial dalam usaha memperlemah kekuatan umat Islam, *keempat*, menghentikan program-program kolonial yang akan membawa bahaya kepada umat Islam, *kelima*, membuka peluang untuk membuat perundang-undang yang akan membawa masalah umat.

C. Kesimpulan

Fakta-fakta diatas telah membuktikan bahwa tradisi politik kaum sufi yang memang sejak awal membawa Islam ke kawasan Nusantara telah membawa corak ajaran Islam yang *syamil* (sempurna) dan *mutakamil* (merangkumi seluruh aspek kehidupan), hal ini tidak terpisahkan dari pengaruh jaringan intelektual ulama Nusantara dan ulama luar Nusantara yang telah terjalin dengan sangat intens, berawal dari sebuah transmisi intelektual sehingga tumbuh dan berkembang menjadi jaringan kekuatan politik melawan hegemoni kolonial, baik melalui perlawanan terbuka (*offensive*) seperti yang dilakukan Ahmad Khatib melalui jaringan tarekatnya maupun sikap kooperatif dan bekerja sama seperti yang ditampilkan

⁵⁰Karel A. Steenbrink (1984), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang), cet. 1, h. 5, 52 dan 65.

oleh kedua ulama Kalimantan Barat abad ke-20 yakni Muhammad Basuni Imran dan Guru Haji Isma'il Mundu.

Daftar Pustaka

- Al Attas, Syed Naquib *Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays*, ed. Shirle Gordon. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963
- , *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001
- al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Abkam al-Sultaniyyah* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Arberry, Athur John. *The Doctrine of the Sufis*. England: Cambridge University Press, 1966
- Ahmad, Shukri, Ismail Yusoff & Hamzah, *Pendekatan Dakwah Ulama Sufi Nusantara Abad ke-17M dan 18M: Suatu Analisis Perbandingan dengan Pendekatan Dakwah Ulama Malaysia Abad ke-21*. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara. IV, 25-26 November 2011
- Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, terj. Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail Bandung: Mizan, 1994,
- al-Mubarafuri, Shafiyurrahman, *al-Rabiq al-Makhtum* Mesir: Dar al-Wafa, 1430 H/ 2009 M.
- A. Harris, Khalif Muammar, "Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad Ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji," *Sari - International Journal Of The Malay World And Civilisation*. 29 (1) 2011
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, c. 2, Bandung: penerbit Mizan, 1995

- Belanda, wester-afdeeling berdasarkan *Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8 dan No. 40
- Bousfield, John, "Islamic Philosophy in Sout-East Asia", dalam *Islam in South-East Asia*, ed. M.B. Hooker Leiden: British Istitute in South East Asia, 1983
- Bruinessen, Martin Van, "*Tarekat Dan Politik: Amalan Untuk Dunia Atau Akberat?*," *Majalah Pesantren* Vol. IX No. 1, 1992.
- , *Tarekat Naqsybandiyah di Indonesia* Bandung: Mizan, 1992
- Effendy, Machrus, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Maba Raja Imam Sambas*, Jakarta: P.T. Dian Kemilau, 1995.
- Hamka, *Sejarah Ummat Islam*, c. 5 Singapura: Pustaka Nasional, 2005.
- Hanafi, A, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama Quran dan Hadits*) Jakarta: Pustaka al Husna, 1981,
- Hanafi, A, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits)*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1981
- Haris, Didik M Nur, "Kitab Jadwal Nikah karya Guru Haji Isma'il Mundu; Teks dan Analisis". Tesis Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya Malaysia, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia pada masa kerajaan Islam di Nusantara*. ISLAMIC A, Vol. 6, No. 1, September 2011
- Irwin, Graham, *Borneo Abad Kesembilan Belas*. Terj. Mohd. Nor Ghani dan Noraini Ismail, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Isma'il, A. Muis *Mengenal Mubammad Basuni (Mabaraja Raja Sambas)*. Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura, 1993.
- Jabbar, Umar 'Abd, *Kitab Siyar wa al-Tarajim ba'd ulamaina fi al-Qarn al-Rabi' al-'Asbr min al-Hijrab*, c. 3. Jedah: Tihamah al-Kitab al-Arabi al-Su'udi, 1403 H/1982 M.

- John Arberry, Athur, *The Doctrine of the Sufis England*: Cambridge University Press, 1966
- Kartodirdjo, Sartono, “*The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: The Religious Revival*,” dalam *Reading on Islam in Southeast Asia*, Ahmad Ibrahim et al., Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1985
- _____*Pemberontakan Petani Banten 1888, Kondisi, Jalan peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, ed. Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Musa, Pabali, “*Latar Belakang Sosial Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas*”, (Disertasi pasca sarjana, UIN, Jakarta, 2008.
- _____*“Muhammad Basuni Imran (1883-1976, Rekonstruksi Pemikiran Maharaja Imam Sambas-Kesultanan Sambas Kalimantan Barat*(Tesis Program Magsiter Pemikiran Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, 1999
- Pijper, G.F.,*Studien Over de Geschiedenis Van De Islam In Indonesia 1900-1950*, Netherlands: E.J. Brill Leiden, 1977
- _____, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah & Yessy Augusdin Jakarta: UI Press, 1984,
- Republika, *Islamia : Tokob-tokob Orientalis di Indonesia. Kamis, 13 Agustus 2009.*
- Riva’I, Abbas., et al. *Biografi Guru Haji Isma’il Mundu Mufti Kerajaan Kubu. Cet. 2*, Pontianak: Kitara Creativision, 2008.
- Shaghir,Wan Mohd, *Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara*, j.6 Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah1425 H/2004 M.
- _____, *Penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu*, Seri 11 Kuala Lumpur: Persatuan Pegkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah, 2000.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* Jakarta: LP3ES, 1996

- Shihab, Alwi, *Islam Sufistik, Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001.
- Srimulyati, *Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Steenbrink, Karel A. (), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, cet. 1 Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984
- Taimiyah, Ibn, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz 1 Riyadh: Maktabat al-Riyad al-Hadithah, t.tp.
- Tim Peneliti Universitas Tanjung Pura (UNTAN), Pontianak: *Istana di Kalimantan Barat*, Untan, 2000).
- Yatim, Badri, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekkah dan Madinah) 1800-1925*. Ciputat: Logos, 1999.

AKAR TRADISI POLITIK SUFI ULAMA KALIMANTAN BARAT ABAD KE-19 DAN 20

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 2%

EXCLUDE MATCHES < 20 WORDS